

**KEPENTINGAN IRAN MEMBANTU QATAR MENGHADAPI  
EMBARGO EKONOMI AKIBAT KRISIS DIPLOMASI NEGARA TELUK**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen  
Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin*

**OLEH :**

**RISNA AULIAH T.**

**E061171011**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

**HALAMAN JUDUL**  
**KEPENTINGAN IRAN MEMBANTU QATAR MENGHADAPI**  
**EMBARGO EKONOMI AKIBAT KRISIS DIPLOMASI NEGARA TELUK**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

**OLEH :**  
**RISNA AULIAH T.**  
**E061171011**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : KEPENTINGAN IRAN MEMBANTU QATAR MENGHADAPI  
EMBARGO EKONOMI AKIBAT KRISIS DIPLOMASI  
NEGARA TELUK

N A M A : RISNA AULIAH T.

N I M : E061171011

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 16 Agustus 2024



Mengetahui :

Pembimbing I,

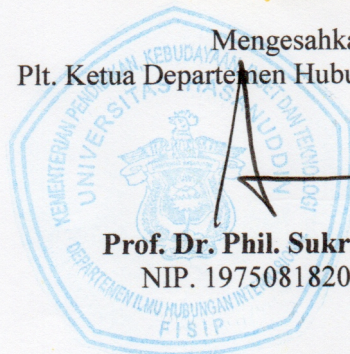
**Dr. H. Adi Suryadi B, MA**  
NIP. 196302171992021001

Pembimbing II,

**Nurjannah Abdullah, S.IP, MA**  
NIP. 198901032019032010

Mengesahkan :

Plt. Ketua Departemen Hubungan Internasional,



**Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si**  
NIP. 197508182008011008

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : KEPENTINGAN IRAN MEMBANTU QATAR MENGHADAPI  
EMBARGO EKONOMI AKIBAT KRISIS DIPLOMASI  
NEGARA TELUK

N A M A : RISNA AULIAH T

N I M : E061171011

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Kamis, 1 Agustus 2024.



Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Mashita Dewi Tidore, S.IP, MA

Anggota : 1. Dr. H. Adi Suryadi B, MA

2. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

3. Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risna Auliah T.  
NIM : E061171011  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul:

**“Kepentingan Iran Membantu Qatar Menghadapi Embargo Ekonomi Akibat Krisis Diplomasi Negara Teluk”**

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi dengan aturan yang berlaku.

Demikian pertanyaan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Makassar, 16 Agustus 2024



Risna Auliah T.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Kepentingan Iran Membantu Qatar Menghadapi Embargo Ekonomi Akibat Krisis Diplomasi Negara Teluk” tepat waktu. Serta kita haturkan Sholawat dan Salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, nabi yang telah menuntun umat manusia menuju zaman yang lebih baik dari sebelumnya.

Besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca. Walau begitu, sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis tidak luput dari kesalahan. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat adanya do'a, bimbingan, bantuan, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc** beserta para jajarannya.
2. Bapak **Dr. H. Adi Suryadi B, MA** dan Kak **Nurjannah Abdullah, S.IP., MA** selaku Dosen Pembimbing skripsi, terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan selama ini dalam membimbing dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. **Dekan dan Wakil Dekan** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
4. Seluruh **Dosen Departement Ilmu Hubungan Internasional** Universitas Hasanuddin, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan berlangsung.
5. Untuk **Orang Tua** tercinta, beribu ucapan terima kasih penulis sampaikan karena tak henti - hentinya memberikan do'a dan dukungan, memberikan kepercayaan kepada anaknya sehingga berhasil menyelesaikan tugas akhir hingga penyelesaian studi.
6. Untuk **My Black & Blue BibleBuild**, terima kasih karna telah memberi cerita baru dalam hidupku. Setelah melewati masa sulit pasca Covid – 19, *Trust*

*Issue* pertemanan, permasalahan keorganisasian yang membuatku merasa hambar menjalani masa itu. Kalian memberi hiburan baru, teman baru yang sampai saat ini kami masih berhubungan baik. Tak lupa pula teman – teman **KP** Ayang El, Halimah, dan Pina teman **HRP** Bang Qyuu, Bang Din, Kak Adel, BunSan, Biii, Liliput, kak Jung *it's nice and love to know you guys*.

7. **UKM Radio Kampus EBS FM Unhas**, Rumah Kedua yang menerima seorang Risna Auliah yang memiliki banyak kekurangan. Dari 2019 hingga saat ini masuk organisasi ini adalah suatu kesyukuran dan tidak pernah saya selali. Lewat EBS saya bertemu Kakak yang baik baik dan banyak dinamika, Kakak Frekuensi, Kak Tiqo, Kak Faiz, Kak Fadel, Yusuf Muskamal teman yang jadi juara bertahan. Lalu adik – adik comel, Pertama Furnarah yang paling bisa diandalkan, Wahyuni(Way) manusia terpalang banyak susah, *Moodie* - an tapi banyakan lawaknya *and the main dancer*, Rian Mode bapak – bapak terpalang banyak pengalaman, Celly terpalang *bestie* sekampung, Alam manusia yang sempat hilang arah, Ardi dan Hasan adik terpalang stand up *last but not least* Nawu dan Ijul adik terpalang *mood*. *Thank You* untuk kalian semua.
8. Kepada Ibu – Ibu **DPMPSTSP Gowa** ibu Ari, Ibu Tini, Ibu Mira, Hj. Sompia, Ibu Ica, terima kasih atas dukungannya dari semenjak saya magang hingga Sekarang dan sudi telah menjadikan saya anak atau adik.

Kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan secara satu per satu, terima kasih atas segala bentuk do'a, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT akan membalas segala kebaikan kalian, aamiin yaa rabbal 'alamin.

Makassar, Juli 2024

**Risna Auliah T.**

## ABSTRAK

**Risna Auliah T. (E061171011), “Kepentingan Iran Membantu Qatar Menghadapi Embargo Ekonomi Akibat Krisis Diplomasi Negara Teluk”,** di bawah bimbingan **Dr. H. Adi Suryadi B, MA** selaku dosen pembimbing I, dan **Nurjannah Abdullah, S.IP.,MA** selaku dosen Pembimbing II pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kepentingan Iran membantu Qatar menghadapi Embargo Ekonomi Akibat Krisis Diplomasi Negara Teluk dan menjelaskan dampak keterlibatan Iran terhadap Qatar menghadapi Embargo Ekonomi Akibat Krisis Diplomasi Negara Teluk. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu Metode Studi Literatur menggunakan pendekatan penelitian yang menganalisis informasi yang bersumber dari buku, berita, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Iran memiliki beberapa Kepentingan terhadap Krisis Diplomasi yang sedang dialami oleh Qatar. Memanfaatkan Qatar sebagai pintu masuk dan peluang ingin menjadi salah satu negara Adidaya di Kawasan Teluk bersaing dengan Arab Saudi dan Amerika Serikat. Normalisasi Hubungan Bilateral Iran - Qatar menguntungkan kedua negara ini, dengan adanya Kerjasama Ekonomi utamanya pada Bidang Sumber Daya Minyak dan Bidang Militer Keamanan. Selain itu, keterlibatan Iran dalam Krisis Diplomasi menyebabkan adanya ancaman Stabilitas di Kawasan Teluk karena beberapa negara teluk enggan untuk memperbaiki hubungan bilateralnya dengan Qatar. Kemudian munculnya respon negatif dari Arab Saudi dan Amerika Serikat akan keterlibatan Iran yang memasukkan pengaruhnya ke Kawasan Teluk Melalui Qatar.

**Kata Kunci:** Iran, Qatar, Krisis Diplomasi, Embargo Ekonomi, Kepentingan Nasional.



## ABSTRACT

**Risna Auliah T. (E061171011)**, *“Iran's Interest In Helping Qatar Face Economic Embargo Due To Gulf Diplomacy Crisis”*, under the guidance of **Dr. H. Adi Suryadi B, MA** as the 1st advisor, and **Nurjannah Abdullah, S.IP.,MA** as the 2nd advisor at The Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Hasanuddin University.

*This research aims to analyz Iran's interest in helping Qatar face the Economic Embargo due to the Gulf State Diplomacy Crisis and explain the impact of Iran's involvement on Qatar facing the Economic Embargo due to the Gulf State Diplomacy Crisis. This research uses a Descriptive Qualitative Method with data collection techniques, namely the Literature Study Method using a research approach that analyzes information sourced from books, news, scientific journals, articles, official documents.*

*The results of this study indicate that Iran has several interests in the diplomatic crisis being experienced by Qatar. Utilizing Qatar as an entrance and opportunity to become one of the superpowers in the Gulf Region to compete with Saudi Arabia and the United States. The normalization of bilateral relations between Iran and Qatar benefits these two countries, with the existence of economic cooperation, especially in the field of oil resources and military security. In addition, Iran's involvement in the Diplomatic Crisis caused a threat to stability in the Gulf Region because some Gulf countries were reluctant to improve their bilateral relations with Qatar. Then the emergence of a negative response from Saudi Arabia and the United States on Iran's involvement in inserting its influence into the Gulf Region through Qatar.*

**Keywords:** *Iran, Gulf States, Diplomatic Crisis, Economic Embargo, National Interest.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Metode Penelitian .....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Konsep Krisis Diplomasi .....	22
B. Konsep Embargo Ekonomi.....	31
C. Konsep Kepentingan Nasional.....	41
D. Penelitian Terdahulu .....	46
BAB III GAMBARAN UMUM .....	51
A. Hubungan Bilateral Iran dan Qatar .....	51
B. Hubungan Bilateral antara Qatar dengan Negara Teluk Anti - Qatar....	54
C. Krisis Diplomasi Qatar .....	64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	79
A. Kepentingan Iran Membantu Qatar Menghadapi Embargo Ekonomi Akibat Krisis Diplomasi Negara Teluk.....	79
B. Dampak Keterlibatan Iran Membantu Qatar Menghadapi Embargo Ekonomi akibat Krisis Diplomasi Negara Teluk.....	93
BAB V.....	112

PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran .....	113
DAFTAR PUSTAKA .....	114

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Konseptual Penelitian.....	18
---	----

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Krisis Diplomasi Qatar dimulai pada tahun 2017 tepatnya pada tanggal 5 Juni, Qatar menghadapi embargo dari sejumlah Negara Teluk dan beberapa negara yang berdampingan dengan kawasan tersebut. Beberapa Negara Teluk memutuskan hubungan diplomasi dengan Qatar diantaranya yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir. Beberapa negara lain di kawasan sekitar seperti Komoro, Mauritania, Libya, Maladewa dan Yaman kemudian mengikuti langkah tersebut. Sementara itu, Chad, Djibouti, Eritrea, Yordania, Nigeria, dan Senegal menurunkan tingkat hubungan diplomatik dengan Qatar tanpa memutuskan hubungan sepenuhnya (Tumanggor, 2018).

Pemutusan hubungan diplomatik ini dilatarbelakangi oleh beberapa konflik masa lalu diantaranya yaitu perseteruan Qatar dengan negara-Negara Teluk terkait sengketa perbatasan, dugaan Qatar menyatakan dukungan terhadap Ikhwanul Muslimin yaitu sebuah gerakan yang dianggap sebagai organisasi terorisme oleh koalisi Arab Saudi dan keterlibatan media utama Qatar yaitu Al-Jazeera dalam peristiwa-peristiwa *Arab Spring*. Pelanggaran Qatar terhadap *Riyadh Agreement* juga ikut andil dalam mendorong terjadinya Krisis Diplomasi pada Qatar. Selain itu, juga diperparah dengan terbentuknya hubungan yang sangat dekat antara Iran - Qatar terutama dalam kerjasama pembagian ladang gas terbesar di dunia yaitu *North Dome dan South Pars* (Cahyani, 2019). Terbentuknya kerjasama ini meningkatkan

ketidaknyamanan negara-negara kuartet karena negara-negara kuartet tersebut tidak pernah menyetujui hubungan baik dalam bidang apapun dengan Iran.

Terdapat Tiga tuntutan yang paling menarik perhatian adalah Qatar dituntut untuk menutup Al-Jazeera, memutuskan hubungan dengan Ikhwanul Muslimin, memutus hubungan dengan Iran, serta Qatar diwajibkan membayar kompensasi dana yang terpakai saat krisis terjadi dan bersedia di kontrol dan diawasi oleh kuartet Negara Teluk. Hal tersebut ditolak oleh Qatar karena dianggap melanggar kemerdekaan dan kedaulatan Qatar (Adwani, 2015). Hal ini menjadikan posisi Qatar diantara negara-negara tetangganya selalu dalam kondisi waspada akibat adanya penolakan dari negara-negara kuartet tersebut terhadap sistem independensi Qatar.

Secara geografis maupun geopolitik, Qatar terletak antara Arab Saudi dan Iran sehingga menjadikan Qatar dikepung oleh dua kekuatan regional Teluk Persia. Koalisi baru yang dibentuk oleh Arab Saudi sebagai kuartet anti Qatar, telah menyinggung keamanan dan menciptakan *security dilemma* bagi Qatar. Oleh karena itu, Qatar terpaksa menghadapi dua pilihan kebijakan, yaitu kembali ke dalam kontrol Saudi atau mengadakan kebijakan independen dan bebas untuk beraliansi dengan Iran (Cahyani, 2019).

Embargo ekonomi yang diberlakukan terhadap Qatar pada tahun 2017 oleh Negara Teluk Yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor di Qatar. Embargo menyebabkan gangguan besar pada jalur perdagangan Qatar. Penutupan

perbatasan darat dengan Arab Saudi dan pembatasan akses ke pelabuhan-pelabuhan di negara-negara pengembargo menyebabkan kelangkaan barang-barang impor dan kenaikan harga. Qatar mengalami penurunan nilai saham dan arus keluar modal asing. Mata uang Qatar, riyal, juga mengalami tekanan. Selain itu, Embargo menyebabkan kekhawatiran tentang keamanan pangan di Qatar, karena sebagian besar pasokan makanan diimpor melalui Arab Saudi. (Tumanggor, 2018) .

Terjadinya Krisis Diplomasi telah membentuk ketimpangan kekuatan antara Qatar dengan koalisi Arab Saudi, sehingga keseimbangan kekuatan sangat mengancam negara Qatar. Oleh karena itu, Qatar sebagai negara kecil yang sedang dalam kondisi rentan membutuhkan sekutu untuk menyeimbangkan kekuatannya. Sehingga tepat jika Qatar memilih untuk beraliansi dengan Iran untuk menambah kekuatannya dalam menghadapi intimidasi kuartet dan membentuk keamanan negaranya sendiri. Strategi ini menghantarkan Qatar untuk bersekutu dengan negara yang hingga hari ini tetap dianggap sebagai negara yang agresif oleh penentangannya atau kuartet anti Qatar. Selama menghadapi Krisis Diplomasi Qatar tahun 2017, hubungan bilateral Qatar dengan Iran semakin bertumbuh dan menguat (Wintour, 2017).

Iran menyambut keputusan dari Qatar membentuk aliansi dan menormalisasi hubungan bilateral dengan tangan terbuka. Ditandai dengan mengirimkan pasokan makanan yang dibutuhkan selama krisis masih berjalan dan membuka ruang udaranya untuk penerbangan Qatar. Qatar yang

notabene negara yang tidak memiliki pertahanan militer yang kuat dan putusnya hubungan diplomasi Qatar dengan kuartet juga menyebabkan Qatar tidak memiliki perlindungan militer. Sehingga dengan dipulihkannya hubungan bilateral Iran - Qatar maka dibuatlah perjanjian keamanan dan kerjasama antara *Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps Navy* (IRGC-N) dengan *Qatar Navy* kembali berlanjut, sehingga kekuatan militer Qatar juga dapat meningkat dikarenakan kekuatan militer Iran tidak dapat diragukan (Direktorat Timur Tengah Kemenlu Indonesia, 2019).

Qatar dalam bidang ekonomi memiliki hubungan yang strategis dengan Iran terkait gas bersama dan memiliki batas maritim dengan Iran yaitu *North Dome dan South Pars*. Ladang gas tersebut merupakan ladang gas terbesar di dunia yang harus dibagi dengan Iran, dikarenakan ladang gas tersebut berbatasan langsung dengan wilayah maritim kedua negara ini. Iran dapat menjadi kekuatan yang sangat mengancam keamanan nasional dan sektor gas Qatar apabila kedua negara ini memiliki hubungan saling berselisih. Hal ini pernah terjadi di tahun 1991 ketika Iran pertama kali menemukan bagian ladang gas nya yaitu *South Pars* namun reda setelah keduanya menandatangani perjanjian dermakasi di tahun 1996. Mengingat sektor gas ini merupakan aset yang sangat vital bagi pertahanan negara Qatar maka Qatar akan terus membutuhkan hubungan baik dengan Iran. Sehingga Qatar tidak akan pernah mengucilkan Iran, karena hal tersebut akan membahayakan hubungan yang mendasari perkembangan ekonomi Qatar (Dargin, 2008).



Qatar sebagai negara yang sedang jatuh, daripada mencari dukungan dari mitra negara yang belum teruji. Qatar secara konsisten menekankan menciptakan hubungan strategis yang penting dengan Iran untuk tetap bisa bertahan hidup. Keputusan Qatar ini dianggap sangat baik untuk kelangsungan ekonominya terlebih pada pendapatan per kapita yang dihasilkan dari bidang minyak dan gas bumi Qatar tersebut. Peran Iran dalam Krisis Diplomasi Qatar adalah memberikan dukungan kepada Qatar, yang telah membantu meringankan dampak blokade (Lynch, 2019).

Iran menjadi penolong masyarakat Qatar yang selama ini merasakan dampak atas krisis tersebut, dimana Iran dapat mengimpor produk – produk yang sama atau yang ditahan dan diembargo oleh negara – negara Teluk akibat dari Krisis Diplomasi Qatar tersebut. Hal ini telah memungkinkan Iran untuk meningkatkan pengaruhnya di Kawasan Teluk, tetapi juga telah menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa anggota *Gulf Cooperation Council (GCC)* atau Dewan Kerjasama Teluk tentang niat Iran. Dukungan Iran untuk Qatar selama krisis telah dilihat sebagai upaya untuk memperdalam pengaruhnya di Kawasan Teluk, yang secara tradisional didominasi oleh Arab Saudi dan sekutunya. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa anggota GCC tentang meningkatnya pengaruh Iran di wilayah tersebut (Ulrichsen, 2023).

Dukungan Iran untuk Qatar juga dapat dilihat sebagai langkah untuk menyeimbangkan pengaruh Arab Saudi di wilayah Kawasan Teluk. Dengan melakukan pemulihan hubungan terhadap Iran, maka Qatar akan tetap dapat

mempertahankan posisinya sebagai negara kaya akan gas dan minyak bumi karena Iran - Qatar itu sendiri memiliki latar belakang kerjasama di bidang minyak yang cukup baik, dan secara tidak langsung kerjasama ini dianggap oleh Qatar sebagai jalan untuk mencapai salah satu ambisi besar Qatar yaitu menjadi negara kecil yang memiliki *Super Power* yang dapat menandingi negara besar lainnya. Sedangkan dari pihak Iran, dengan mendukung Qatar, Iran berpotensi melemahkan persatuan Dewan Kerjasama Teluk (GCC), yang dipimpin oleh Arab Saudi. Iran dapat memperoleh leverage diplomatik atau daya tawar menjadi mitra kerjasama di wilayah tersebut dan mempresentasikan dirinya sebagai mitra yang membantu dan dapat diandalkan.

Kerjasama Iran – Qatar sebagai taktis menghadapi embargo ekonomi memunculkan reaksi bagi beberapa negara baik pada Kawasan Teluk atau kawasan lain. Utamanya Arab Saudi dan beberapa negara lain di kawasan Teluk menganggap kerjasama ini sebagai ancaman bagi stabilitas keamanan dan politik di kawasan tersebut (Rahmat & Turmudzi, 2020). Mereka menuduh Qatar sebagai sponsor kelompok teroris dan mengklaim bahwa Qatar telah melakukan pengkhianatan terhadap negara-negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC) karena kedekatan dengan Iran (Rahmat & Turmudzi, 2020). Kedekatan ini dianggap sebagai ancaman oleh Arab Saudi karena Iran dianggap sebagai negara yang memiliki ideologi yang berbeda dan dapat mempengaruhi stabilitas di kawasan tersebut.

Negara-negara yang melakukan blokade terhadap Qatar, seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir, juga menuntut Qatar untuk menutup misi diplomatik di Iran dan mengurangi intensitas kerjasama dengan Iran (Hanifan, 2021). Mereka menekankan bahwa Qatar harus memilih sisi dan menghentikan hubungan dengan Iran agar Krisis Diplomasi dapat diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara lain berusaha mempengaruhi Qatar untuk memilih sisi dan menghindari kerjasama dengan Iran.

Respon Turki dan Rusia, yang tidak bergabung dalam blokade, menyerukan dialog untuk menyelesaikan krisis. Mereka berpendapat bahwa krisis dapat diselesaikan melalui dialog dan tidak melalui tindakan sanksi ekonomi atau blokade (Fatunninsa, 2020). Turki dan Rusia juga menekankan pentingnya mempertahankan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Qatar, meskipun mereka tidak sepenuhnya mendukung kerjasama Qatar dengan Iran.

Pemerintah Qatar sendiri mengecam tindakan negara-negara lain yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan didasarkan pada klaim palsu (Oktarezki, et. Al, 2021). Pemerintah Qatar menekankan bahwa tindakan ini adalah upaya untuk memberlakukan perwalian pada negara tersebut, yang merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Qatar.

Iran menjadi salah satu alasan terjadinya Krisis Diplomasi yang dialami Qatar dan menjadi negara yang berusaha membantu menyelesaikan dampak dari Krisis Diplomasi ini. Kondisi internal Iran dan kapasitasnya memiliki beberapa faktor yang dapat membantu Qatar menghadapi embargo baik menjadi mediator maupun memberikan bantuan ekonomi hingga kerjasama bilateral. Iran sendiri menyerukan dialog untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dalam krisis. Iran berusaha untuk mempertahankan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Qatar, meskipun mereka juga menekankan pentingnya mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Iran telah membentuk kelompok kerja gabungan dengan Turki dan Qatar untuk memfasilitasi keluar dan masuknya barang dan transit produksi ketiga negara tersebut, yang menunjukkan bahwa Iran berusaha untuk mempertahankan hubungan dengan Qatar meskipun ada tekanan dari negara-negara lain.

Iran melihat kesempatan untuk memperkuat hubungan dengan Qatar dan berpotensi mendapatkan akses ke lokasi strategis dan sumber daya. Lokasi geografis Qatar, dengan kedekatannya dengan Iran dan akomodasi pangkalan militer AS, menjadikannya sekutu yang berharga bagi Iran di wilayah tersebut. Kepentingan Iran terhadap Qatar selama Krisis Diplomasi dapat dikaitkan dengan kepentingan ekonomi bersama, keinginan untuk menantang dominasi Arab Saudi, dan potensi manfaat strategis dari menyesuaikan diri dengan Qatar. Melalui aliansi ini, Iran dapat menantang dominasi Arab Saudi dan sekutunya dan meningkatkan pengaruhnya pada Kawasan Teluk (Kakar, 2019).

Iran memiliki beberapa kepentingan yang muncul sebagai dampak dari tindakan Arab Saudi dan kuartet melakukan embargo terhadap Qatar. Dengan Arab Saudi dan sekutunya memutuskan hubungan dan embargo terhadap Qatar, penerbangan dari dan ke Qatar dialihkan melalui Iran. Hal ini menciptakan peluang ekonomi baru bagi Iran, terutama di sektor penerbangan dan logistik, karena penerbangan di Iran meningkat secara signifikan. Dengan Qatar terpaksa mencari rute alternatif melalui Iran, ini dapat meningkatkan hubungan bilateral antara Iran – Qatar (Lynch, 2019).

Iran memanfaatkan Krisis Diplomasi Qatar untuk memperkuat kerjasama bilateral dengan Qatar, baik secara ekonomi maupun politik. Dengan menjadi rute utama bagi Qatar, Iran dapat meningkatkan pengaruhnya di kawasan tersebut. Qatar yang bergantung pada Iran untuk memenuhi kebutuhan logistiknya dapat membuka pintu bagi Iran untuk memiliki peran lebih signifikan dalam dinamika geopolitik di Teluk. Dengan peningkatan jumlah penerbangan yang melibatkan Iran, sektor penerbangan di negara tersebut dapat mengalami pertumbuhan signifikan. Ini mencakup keuntungan ekonomi dari layanan penerbangan, penggunaan fasilitas bandara, dan potensi investasi dalam infrastruktur penerbangan (Adwani, 2015).

Sebelum Krisis Diplomasi Qatar, Iran beberapa kali terlibat dalam sebuah konflik. Iran diduga dukungan dan bantuan yang diberikan kepada pemberontak Houthi di Yaman, yang juga berfaham Syi'ah. Dukungan ini mencakup dukungan politik, ekonomi, dan militer, yang menunjukkan bahwa

Iran siap untuk membantu negara-negara yang memiliki ideologi dan kepentingan yang sama. Dukungan ini dapat membantu Qatar dalam menghadapi embargo, terutama dalam konteks kebijakan luar negeri yang defensif (Iii, n.d).

Penelitian berfokus pada hubungan Qatar, Iran dan Kawasan Negara Teluk dan penting untuk memahami secara mendalam peran strategis yang dimainkan Iran dalam membantu Qatar menghadapi embargo. Hal ini termasuk menganalisis motivasi Iran, baik itu didorong oleh kepentingan geopolitik, ekonomi, atau ideologis. Iran melihat adanya kemungkinan dan peluang dalam situasi tersebut untuk membentuk kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, ditinjau dari pemaparan serta data yang diperoleh, hal ini cukup menarik bagi penulis untuk dapat Menganalisa **“Kepentingan Iran Membantu Qatar Menghadapi Embargo Ekonomi Akibat Krisis Diplomasi Negara Teluk”**.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian, maka dilakukan pembatasan masalah agar mempermudah penulisan penelitian ini. Penulis akan akan menitikberatkan pada kepentingan Iran terhadap krisis yang dialami oleh Qatar selama Krisis Diplomasi Qatar dan menganalisis dampak yang dihasilkan oleh keterlibat Iran. Penelitian ini memilih periode tahun 2017 hingga 2022 karena pada tahun tersebut terjadinya Krisis Diplomasi Qatar dan perkembangan hubungan bilateral antara Iran - Qatar. Iran melihat

kondisi tersebut sebagai peluang untuk membangun kembali citra negaranya dan mengembangkan pengaruhnya di kawasan Teluk. Iran melakukan kerja sama dengan Qatar karena sejalan dengan kepentingan nasionalnya yaitu untuk menyaingi pengaruh Arab Saudi di kawasan Negara Teluk. Untuk mengetahui dan menjawab permasalahan pada penelitian ini, maka penulis merumuskan pernyataan penelitian, yaitu :

1. Apa kepentingan Iran membantu Qatar yang menghadapi embargo ekonomi akibat Krisis Diplomasi Negara Teluk?
2. Bagaimana dampak dari keterlibatan Iran membantu Qatar menghadapi embargo ekonomi akibat Krisis Diplomasi Negara Teluk?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang sudah di paparkan diatas, tujuan dilakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui kepentingan Iran terhadap Qatar yang menghadapi Embargo Ekonomi akibat Krisis Diplomasi Negara Teluk.
2. Mengetahui dampak dari adanya bantuan Iran terhadap Qatar yang menghadapi Embargo Ekonomi akibat Krisis Diplomasi Negara Teluk.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua kalangan, secara khusus hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dari dua sisi yakni melalui penelitian ini, penulis berharap dapat menambah dan pembaca

khususnya akademisi dan mahasiswa program studi hubungan internasional mengenai Kepentingan Iran membantu Qatar menghadapi Embargo Ekonomi akibat Krisis Diplomasi Negara Teluk. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan mampu menjadi pembanding bagi mahasiswa Departemen Ilmu Hubungan Internasional maupun mahasiswa departemen lain yang ingin meneliti dan mengkaji mengenai Kepentingan Iran membantu Qatar menghadapi Embargo Ekonomi akibat Krisis Diplomasi Negara Teluk

#### **E. Kerangka Konseptual**

Pembahasan mengenai Kepentingan Iran Membantu Qatar Menghadapi Embargo Ekonomi Akibat Krisis Diplomasi Negara Teluk memerlukan konsep- konsep yang tepat untuk digunakan sebagai alat analisis lebih lanjut agar penelitian terkait dapat bersifat ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Konsep Krisis Diplomasi, Embargo Ekonomi dan Konsep Kepentingan Nasional.

##### **1. Konsep Krisis Diplomasi**

Diplomasi merupakan seni dan praktik negosiasi yang dilakukan oleh seorang diplomat, yang umumnya terkait dengan diplomasi internasional yang mencakup berbagai aspek seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan. Diplomat sering dianggap sebagai individu yang dapat mencapai keuntungan melalui penggunaan kata-kata yang diplomatis. Pembicaraan perjanjian internasional biasanya dilakukan oleh pejabat tinggi negara (Rudy, 2014).



Menurut G. R. Berridge (2005) Dalam bukunya "Diplomacy: Theory and Practice Diplomasi bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan baik antar negara, yang penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas internasional, bukanlah asumsi yang dikeluarkan oleh satu ahli tertentu. Ini adalah pemahaman yang diterima secara luas dalam studi hubungan internasional dan praktik diplomasi. Diplomasi berfungsi untuk mencegah dan menyelesaikan konflik, serta mempromosikan kerjasama internasional.

Diplomasi yang tidak berjalan lancar dapat menyebabkan adanya konflik diplomasi atau krisis diplomasi. Krisis diplomasi adalah situasi yang menegangkan dalam hubungan antarnegara, di mana terjadi perselisihan atau konflik yang berpotensi mengganggu atau bahkan memutuskan hubungan Diplomasi. Krisis ini dapat muncul secara tiba-tiba atau berkembang secara bertahap, dan dapat melibatkan berbagai isu, mulai dari sengketa wilayah, pelanggaran hak asasi manusia, perbedaan ideologi, hingga konflik kepentingan ekonomi. (Morse, 1972)

Edward L. Morse (1972) mendefinisikan krisis diplomasi sebagai situasi di mana hubungan antar negara, terutama negara-negara industri Barat, mengalami ketegangan dan ketidakstabilan akibat krisis ekonomi. Krisis ini dapat berupa guncangan ekonomi yang tiba-tiba, seperti krisis moneter atau krisis utang, atau permasalahan ekonomi yang berkepanjangan seperti resesi atau stagnasi.

Konsep krisis diplomasi memberikan kerangka pemahaman yang komprehensif tentang dinamika hubungan internasional yang kompleks dalam situasi embargo. Krisis diplomasi mengacu pada situasi di mana hubungan antarnegara memburuk secara signifikan, seringkali disertai dengan ancaman atau penggunaan kekuatan. Dalam konteks penelitian ini, konsep ini membantu menjelaskan bagaimana krisis diplomatik antara Qatar dan negara-negara tetangganya memicu embargo dan bagaimana Iran memanfaatkan situasi ini untuk mencapai kepentingannya sendiri.

## **2. Konsep Embargo Ekonomi**

Embargo adalah perintah sebuah negara yang membatasi perdagangan atau perdagangan dengan negara tertentu atau pertukaran barang tertentu. Ini merupakan hasil dari situasi politik atau ekonomi yang tidak menguntungkan antara negara-negara. Embargo merupakan sebuah alat politik yang digunakan oleh satu negara untuk menekan negara lain. Embargo biasanya diberlakukan sebagai hasil dari masalah politik atau ekonomi antara negara-negara, dan mereka dirancang untuk mengisolasi negara dan menciptakan kesulitan bagi badan penguasaannya. Embargo sering digunakan sebagai alat diplomatik untuk memaksa sebuah negara untuk mengubah kebijakan atau perilaku (Miller, 2019).

Bila ditelisik lebih jauh didapati bahwa amanat Bab VII Pasal 39 dan 41 mengarah dan mengacu pada embargo sebagai suatu sanksi ekonomi. Hal ini secara gamblang dijelaskan bahwa diberikan dan disediakan

kesempatan yang seluas-luasnya (khususnya dewan keamanan) dalam menetapkan tindakan-tindakan yang terkait dengan pemberlakuan sanksi ekonomi, akan tetapi tidak bisa ditampik bahwa embargo dalam kerangka sanksi ekonomi ini juga berpengaruh pada aspek-aspek politik (Schermers & Blokker, 2011).

Sanksi ekonomi berupa embargo ini merupakan alat pemaksa yang dipakai dengan tujuan merubah kebijakan pemerintah atau negara serta untuk mencegah aliran komoditas atau produk dari dan ke negara yang dikenakan sanksi. Oleh karena itu berdasarkan paparan di atas maka secara konseptual embargo diartikan sebagai perintah pemerintah yang membatasi perdagangan atau pertukaran barang dengan negara tertentu. Embargo juga secara khusus dirancang untuk mengisolasi suatu negara dan menciptakan kesulitan bagi badan pengaturnya sekaligus memaksa negara itu untuk bertindak memperbaiki masalah yang menyebabkan embargo (Baldwin, Hamilton, Carl, & Sapir, 1998).

Konsep embargo yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini yaitu embargo ekonomi. Embargo ekonomi bertujuan untuk melemahkan bidang ekonomi suatu negara melalui larangan ekspor dan impor dari negara tersebut. Embargo ekonomi ini akan sangat berdampak pada keberlangsungan suatu negara karena menjadi salah penyokong berdirinya suatu negara. Teori ini sesuai untuk membedah latar belakang embargo ekonomi pada Qatar dan dampak kerjasama Iran terhadap Qatar.

Teori embargo ekonomi membantu peneliti memahami mekanisme yang mendasari embargo, termasuk jenis-jenis sanksi yang diberlakukan, sektor-sektor yang ditargetkan, dan dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan di Qatar. Dalam penelitian ini, analisis ini akan menjelaskan bagaimana embargo mempengaruhi perdagangan, investasi, transportasi, dan sektor-sektor vital lainnya di Qatar, menciptakan peluang bagi Iran untuk memberikan bantuan dan memperluas pengaruhnya.

### **3. Konsep Kepentingan Nasional**

Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang mencakup kebebasan, kemerdekaan, kedaulatan, keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, keterlibatan, kebahagiaan, dan keamanan. Pencapaian sasaran ini bergantung pada seberapa pentingnya sasaran tersebut bagi negara tertentu. Proses formulasi kepentingan nasional melibatkan pertimbangan terhadap kapabilitas negara, yang kemudian mencakup aspek kekuasaan. Kekuasaan memiliki peran kunci dalam strategi yang diterapkan untuk mencapai kepentingan nasional (Hamid, 2021)

Konsep kepentingan nasional Menurut Hans J. Morgenthau adalah berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, Kekuasaan (power) dan Kepentingan (interest) sebuah Negara sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional (Trahadastadie, 2019). Selain itu, Hans J. Morgenthau juga menekankan bahwa kepentingan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk

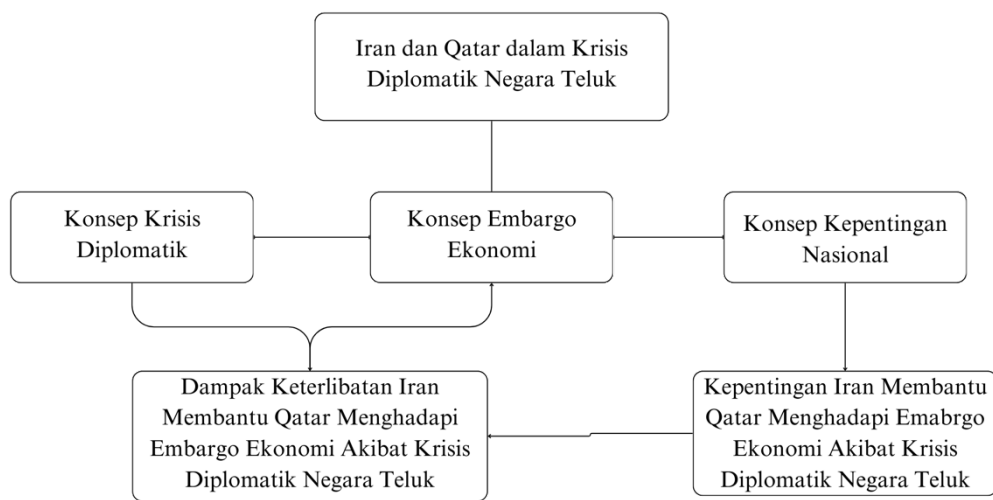
melindungi serta mempertahankan identitas fisik, politik, dan budayanya dari ancaman negara lain (Marleku, 2013). Dalam kepentingan nasional, terdapat perbedaan yang mendasar yaitu kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat non-vital atau sekunder. Kepentingan vital menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, kepentingan ini lebih berdasar kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan non-vital yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama (Jemadu, 2008).

Kepentingan nasional adalah dasar dari diplomasi, yang diartikan sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan, keamanan, dan kesejahteraan suatu negara (Rendi Prayuda, 2019). Dalam Krisis Diplomasi Qatar, kepentingan nasional dapat dilihat dari perspektif pertahanan dan kekuatan, ekonomi dan kesejahteraan, hubungan diplomatik, dan legitimasi dan kedaulatan. Qatar berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan nasionalnya melalui kerjasama dengan Iran, sementara negara-negara lain, seperti Arab Saudi, menilai bahwa kerjasama ini adalah ancaman bagi stabilitas keamanan dan politik di kawasan Teluk.

Berdasarkan beberapa definisi tentang kepentingan nasional di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa konsep kepentingan nasional tersebut merupakan wujud dari kemampuan suatu negara untuk melindungi serta

mempertahankan identitas fisik, politik, dan budayanya dari ancaman negara lain yang sejalan dengan konsep yang digunakan untuk meneliti kepentingan nasional Iran dalam membantu Qatar menghadapi Embargo Ekonomi akibat krisis diplomasi Negara Teluk.

Bagan 1.1 Kerangka Konseptual Penelitian



*Sumber : Diolah oleh Penulis*

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian dengan judul "Kepentingan Iran Membantu Qatar Menghadapi Embargo Ekonomi Akibat Krisis Diplomasi Negara Teluk " yang menggunakan pendekatan tipe penelitian kualitatif- deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis peran serta kepentingan Iran dalam menghadapi Krisis Diplomasi antara Qatar dan negara-negara Teluk yang dipicu oleh embargo ekonomi selama periode 2017-2022. Penelitian kualitatif deskriptif berfokus pada

pemahaman mendalam dan deskriptif mengenai fenomena yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, fokusnya adalah peran dan kepentingan Iran dalam menghadapi Krisis Diplomasi Qatar.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dengan metode studi literatur dalam penelitian berjudul "Kepentingan Iran Membantu Qatar Menghadapi Embargo Ekonomi Akibat Krisis Diplomasi Negara Teluk" digunakan untuk mengumpulkan informasi dan wawasan dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Metode studi literatur adalah pendekatan penelitian yang menggali, menganalisis, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan riset, dan dokumen resmi. Pendekatan ini cocok untuk penelitian yang berfokus pada pemahaman konteks historis, politik, dan ekonomi (Nuha, 2017).

## **3. Jenis Data**

Jenis data menggunakan jenis data sekunder, pembahasan jenis data ini akan membahas sifat dan karakteristik data sekunder serta kelebihan dan batasan penggunaannya dalam penelitian, pada penelitian dengan judul "Kepentingan Iran Membantu Qatar Menghadapi Embargo Ekonomi Akibat Krisis Diplomasi Negara Teluk". Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan dan dihasilkan oleh sumber lain

sebelumnya. Ini bisa berupa data dari penelitian sebelumnya, laporan pemerintah, jurnal ilmiah, buku, dan sumber-sumber lainnya. Dalam penelitian tentang peran dan kepentingan Iran dalam Krisis Diplomasi Qatar, penggunaan data sekunder dapat memberikan pemahaman yang dalam tentang sejarah, konteks, dan dinamika konflik tersebut. Data sekunder dapat mencakup berbagai jenis informasi, seperti laporan pemerintah, analisis dari ahli regional, dokumen kebijakan luar negeri, dan sumber-sumber lain yang relevan. Meskipun ada keterbatasan dalam kontrol dan kualitas data sekunder, penggunaannya dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam membahas masalah yang kompleks ini dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran Iran dalam Krisis Diplomasi ini.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif dengan pendekatan naratif, content analysis dan case study dalam penelitian berjudul "Kepentingan Iran Membantu Qatar Menghadapi Embargo Ekonomi Akibat Krisis Diplomasi Negara Teluk" akan membantu menggali pemahaman mendalam tentang peran dan kepentingan Iran dalam konteks Krisis Diplomasi ini. Dalam identifikasi naratif, peneliti akan mengidentifikasi narasi atau dokumen yang relevan dalam berbagai sumber data, seperti laporan, hasil wawancara, dan artikel. Dalam identifikasi case study, peneliti akan memilih kasus-kasus spesifik yang relevan untuk dianalisis.



Kasus-kasus ini dapat mencakup tindakan dan kebijakan Iran yang signifikan dalam konteks krisis. Dalam identifikasi content analysis, peneliti akan mengidentifikasi teks-teks yang relevan, seperti dokumen kebijakan, berita, dan pidato resmi yang berhubungan dengan peran dan kepentingan Iran dalam Krisis Diplomasi. Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual tentang peran dan kepentingan Iran dalam Krisis Diplomasi Qatar yang diakibatkan oleh embargo ekonomi negara-negara Teluk. Ini akan membantu menjawab pertanyaan penelitian dan menghasilkan temuan yang kaya dalam konteks hubungan internasional.

## **5. Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan deduktif adalah salah satu pendekatan penulisan yang digunakan untuk menyusun teks atau laporan berdasarkan pendekatan pemikiran deduktif, yang berarti menguraikan informasi atau fakta secara logis dari konsep umum atau hipotesis ke dalam hal-hal yang lebih khusus. Dengan menggunakan metode penulisan deduktif dalam penelitian ini, penulis akan dapat menyusun teks atau laporan yang logis dan terstruktur, memungkinkan pembaca untuk memahami secara mendalam peran dan kepentingan Iran dalam Krisis Diplomasi Qatar akibat embargo ekonomi negara-negara Teluk.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Krisis Diplomasi**

Diplomasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan hubungan internasional dan politik luar negeri suatu negara. Diplomasi dapat didefinisikan sebagai seni dan praktik negosiasi antara perwakilan dari negara-negara yang berdaulat atau organisasi-organisasi lainnya, dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah internasional melalui cara-cara damai (Barston, 2019). Definisi ini menekankan diplomasi sebagai sarana untuk mencapai penyelesaian masalah secara damai melalui negosiasi dan komunikasi.

Dalam konteks yang lebih luas, diplomasi juga dapat diartikan sebagai manajemen hubungan internasional melalui negosiasi, metode untuk mewakili kepentingan negara dalam hubungan internasional, atau bahkan sebagai proses komunikasi antara aktor-aktor internasional (Gottardi & Mezzetti, 2024). Diplomasi melibatkan berbagai aktivitas, seperti perwakilan, negosiasi, pelaporan, promosi kepentingan nasional, pencegahan konflik, dan pemeliharaan hubungan baik antara negara-negara.

Secara umum, diplomasi dapat dipahami sebagai metode untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasional suatu negara melalui negosiasi, komunikasi, dan perwakilan damai, serta memelihara hubungan baik dengan negara-negara lain. Tujuan utama dari diplomasi adalah untuk melindungi

dan memajukan kepentingan nasional suatu negara di panggung internasional melalui sarana-sarana damai (Rana, 2007). Tujuan ini dapat dicapai melalui berbagai fungsi diplomasi, antara lain:

- a. **Negosiasi:** Diplomasi berperan dalam melakukan negosiasi dan perundingan dengan negara-negara lain untuk mencapai kesepakatan atau resolusi atas permasalahan internasional.
- b. **Representasi:** Diplomasi berfungsi untuk mewakili dan mempromosikan kepentingan nasional suatu negara di hadapan negara-negara lain atau organisasi internasional.
- c. **Perlindungan:** Diplomasi bertujuan melindungi warga negara, properti, dan kepentingan nasional suatu negara di luar negeri.
- d. **Pelaporan:** Diplomasi bertugas untuk mengumpulkan informasi dan melaporkan perkembangan situasi internasional yang relevan bagi negara asal.
- e. **Pencegahan konflik:** Diplomasi berupaya mencegah dan menghindari terjadinya konflik antarnegara melalui negosiasi dan komunikasi.
- f. **Pemeliharaan hubungan baik:** Diplomasi berperan dalam memelihara hubungan baik antara negara-negara, mengelola krisis, dan membangun kerjasama internasional (Barston, 2019).
- g. **Diplomasi ekonomi:** Diplomasi juga berperan dalam mempromosikan dan memfasilitasi hubungan ekonomi, seperti

perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi antarnegara (Rana, 2007).

Diplomasi bagaikan seni menari kata, di mana seorang diplomat, perwakilan negara atau organisasi, melangkah dengan penuh perhitungan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Jauh dari sekadar perbincangan biasa, diplomasi internasional menjelma menjadi orkestrasi kompleks yang mengantarkan berbagai isu, mulai dari budaya, ekonomi, hingga perdagangan, ke ranah kerjasama dan saling pengertian (Setiawan, 2016)

Diplomasi telah menjadi salah satu bagian yang vital dalam kehidupan negara dan merupakan sarana utama guna menangani masalah-masalah internasional agar dapat dicapai suatu perdamaian dunia. Diplomasi, sebagai proses politik, bertujuan untuk menjaga dan memperkuat kebijakan luar negeri suatu negara dalam mempengaruhi kebijakan dan sikap negara lain.

Menurut John T. Rourke, Peranan Diplomasi dipengaruhi oleh Setting atau pengaruh lingkungan yang sering disebut dengan Diplomacy Setting. Setting dalam hal ini adalah sebuah kondisi yang mempunyai peran penting dalam menghasilkan output dari Diplomasi. Lingkungan Diplomasi memiliki bagian yang mencakup tentang hubungan dari aktor yang terlibat dalam sebuah permasalahan. Selain itu, John T. Rourke juga mengemukakan adanya Diplomasi Perlawanan, lingkungan pada Diplomasi

Perlawanan diakibatkan oleh konfrontasi diantara dua atau lebih negara yang memiliki benturan kepentingan namun belum terjadi konflik bersenjata. Diplomasi ini berdasarkan pada isu internasional seperti suatu Negara menekan negara lainnya untuk memperoleh apa yang mereka inginkan (Rendi Prayuda, 2019).

Teori diplomasi yang dikembangkan oleh John T. Rourke sangat relevan dalam memahami Krisis Diplomasi Qatar. Rourke mengemukakan bahwa diplomasi adalah proses interaksi antara negara-negara yang berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan nasional mereka melalui komunikasi dan negosiasi (Rendi Prayuda, 2019). Dalam Krisis Diplomasi Qatar, komunikasi antara negara-negara yang terlibat merupakan hal yang sangat penting. Komunikasi yang efektif dapat membantu dalam menyelesaikan konflik dan mencapai kesepakatan. Pemerintah Qatar, misalnya, telah mengecam tindakan negara-negara lain yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, mengingat bahwa tindakan tersebut menyinggung kedaulatan Qatar dan didasarkan pada klaim palsu. Hal ini menunjukkan bahwa Qatar berusaha untuk menyampaikan pesan yang jelas dan tegas kepada negara-negara lain melalui komunikasi yang efektif.

Negosiasi adalah bagian penting dari diplomasi, yang melibatkan upaya untuk mencapai kesepakatan melalui diskusi dan perjanjian (Olivia, 2012). Dalam Krisis Diplomasi Qatar, negosiasi telah dilakukan oleh beberapa negara, termasuk Turki, Rusia, dan Iran, yang menyerukan dialog untuk menyelesaikan krisis. Kuwait juga berusaha melakukan mediasi

perundingan antara Qatar dan Arab Saudi untuk meredakan ketegangan. Hal ini menunjukkan bahwa negosiasi merupakan cara yang efektif untuk menyelesaikan konflik dan mencapai kesepakatan.

Salah satu tugas utama diplomasi adalah mendorong hubungan ekonomi negara yang diwakili terhadap negara tujuan khususnya dalam hal menjaga hubungan pasar, pengawasan dan perlindungan. Aktivitas inilah yang kemudian disebut sebagai diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi merupakan suatu proses dimana negara berhubungan dengan dunia luar dalam upaya memaksimalkan tujuannya di segala bentuk aktivitas, seperti perdagangan, investasi, dan bentuk lainnya dari interaksi ekonomi. Dimensi diplomasi ekonomi sendiri dapat berupa bilateral, regional, maupun multilateral yang terdiri dari agen resmi yaitu kementerian luar negeri dan perdagangan, layanan diplomatik dan komersial, serta aktor non-negara lainnya sehingga membuat partnership ekonomi bersifat dinamis (Rana, 2007).

Namun, di tengah upaya diplomasi, Krisis Diplomasi dapat muncul bagaikan badai yang menerjang. Krisis Diplomasi merujuk pada situasi genting dalam hubungan internasional di mana dua atau lebih negara mengalami ketegangan dan permusuhan yang signifikan. Terkadang Krisis Diplomasi merupakan suatu realitas yang tidak dapat dihindari. Krisis Diplomasi mengacu pada perselisihan atau sengketa antara dua atau lebih negara yang diselesaikan melalui hubungan diplomatik dan bukan melalui tindakan militer (Cetinkaya et al., 2019). Krisis Diplomasi sering

melibatkan isu-isu hubungan internasional, seperti sengketa perdagangan, sengketa wilayah, atau masalah hak asasi manusia. Dalam konteks media dan komunikasi, Krisis Diplomasi dapat mengacu pada cara-cara di mana negara menggunakan media untuk mempengaruhi opini publik dan negosiasi posisi mereka dalam perselisihan ini.

Krisis Diplomasi dapat didefinisikan sebagai situasi ketegangan atau perselisihan antara dua atau lebih negara yang berdaulat, yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan. Krisis ini melibatkan upaya untuk menyelesaikan permasalahan melalui saluran diplomatik, seperti negosiasi, mediasi, atau penyelesaian sengketa secara damai (Siracusa, 2010). Dalam konteks ini, Krisis Diplomasi menjadi wahana bagi negara-negara untuk menyampaikan tuntutan, mengajukan protes, atau melakukan tekanan kepada negara lain tanpa melibatkan tindakan militer. Terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya Krisis Diplomasi antarnegara, di antaranya:

- a. Sengketa wilayah: Perselisihan terkait batas wilayah darat, laut, atau udara seringkali memicu Krisis Diplomasi antara negara-negara yang terlibat (Fravel, 2008).
- b. Persaingan kekuasaan: Persaingan antara negara-negara untuk memperebutkan pengaruh dan kekuasaan di suatu kawasan atau secara global dapat memicu Krisis Diplomasi (Mearsheimer, 2014).

- c. Perbedaan ideologi: Perbedaan sistem politik, ideologi, atau nilai-nilai yang dianut oleh negara-negara dapat memicu Krisis Diplomasi (Huntington, 1993).
- d. Masalah keamanan: Ancaman keamanan, seperti terorisme, proliferasi senjata, atau konflik internal di suatu negara, dapat memicu Krisis Diplomasi dengan negara-negara lain
- e. Isu ekonomi: Sengketa perdagangan, persaingan sumber daya alam, atau kebijakan ekonomi yang merugikan negara lain dapat memicu Krisis Diplomasi (Gilpin & Gilpin, 2001).
- f. Pelanggaran hak asasi manusia: Pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia di suatu negara dapat memicu reaksi diplomatik dari negara-negara lain (Donnelly et al., 2013).

Krisis Diplomasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan intensitas, cakupan, dan cara penyelesaiannya (Berridge & Lloyd, 2012):

- a. Konflik bilateral: Konflik yang terjadi antara dua negara secara langsung, seperti sengketa perbatasan atau perselisihan ekonomi.
- b. Konflik multilateral: Konflik yang melibatkan lebih dari dua negara, seperti konflik regional atau konflik yang melibatkan organisasi internasional.
- c. Konflik terbatas: Konflik yang terbatas pada isu-isu tertentu dan tidak mempengaruhi keseluruhan hubungan antarnegara.



- d. Konflik komprehensif: Konflik yang mencakup berbagai isu dan mempengaruhi keseluruhan hubungan antarnegara.
- e. Konflik tertutup: Konflik yang diselesaikan melalui negosiasi rahasia atau saluran diplomatik tertutup.
- f. Konflik terbuka: Konflik yang diselesaikan melalui negosiasi terbuka atau melibatkan opini publik dan media massa.

Dampak Krisis Diplomasi dapat dirasakan di berbagai aspek, mulai dari politik dan ekonomi. Dari aspek Politik dapat dilihat dari Menurunnya kepercayaan dan kerjasama dan kerjasama antar negara, mempersulit koordinasi dan pengambilan keputusan bersama dalam isu-isu global. Kemudian Ketidakstabilan hubungan luar negeri baik bilateral maupun regional dan diperburuk dengan adanya Isolasi dan sanksi Internasional seperti embargo perdagangan atau pembekuan aset, yang dapat berdampak negatif pada ekonominya (Moejito, 2018).

Selanjutnya dampak ekonomi, adanya Krisis Diplomasi Krisis Diplomasi dapat mengganggu perdagangan dan investasi antar negara, merugikan kedua belah pihak. Terlebih jika Krisis Diplomasi ini diikuti dengan adanya Embargo yang diberikan kepada sebuah negara. Timbulnya spekulasi di pasar keuangan dan menyebabkan penurunan nilai mata uang negara yang terlibat. Kemudian terhambatnya jalur perdagangan dan meningkatkan biaya transportasi dan logistik (Ahmad, 2016).

Resolusi Krisis Diplomasi merujuk pada upaya untuk menyelesaikan perselisihan antarnegara melalui sarana-sarana damai dan diplomatik.

Terdapat beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikan Krisis Diplomasi, antara lain (Zartman & Touval, 2010):

- a. **Negosiasi langsung:** Negara-negara yang terlibat dalam konflik melakukan negosiasi secara langsung untuk mencapai kesepakatan atau kompromi.
- b. **Mediasi:** Melibatkan pihak ketiga yang netral untuk memfasilitasi negosiasi dan membantu mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
- c. **Konsiliasi:** Menggunakan jasa pihak ketiga yang netral untuk menyelidiki fakta-fakta dan memberikan saran atau rekomendasi penyelesaian konflik.
- d. **Arbitrase:** Menyerahkan penyelesaian konflik kepada pihak ketiga yang berwenang untuk memberikan keputusan yang mengikat bagi semua pihak.
- e. **Penyelesaian secara hukum:** Membawa sengketa ke lembaga peradilan internasional, seperti Mahkamah Internasional, untuk memperoleh putusan yang mengikat.
- f. **Resolusi melalui organisasi internasional:** Menyelesaikan konflik melalui mekanisme yang disediakan oleh organisasi internasional seperti PBB, Uni Afrika, atau organisasi regional lainnya.

Pemilihan mekanisme resolusi Krisis Diplomasi bergantung pada faktor-faktor seperti sifat konflik, kepentingan yang terlibat, hubungan antarnegara, dan kesediaan untuk berkompromi. Resolusi yang efektif

memerlukan komitmen dari semua pihak untuk bernegosiasi dengan itikad baik, menghormati prinsip-prinsip hukum internasional, dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan

## **B. Konsep Embargo Ekonomi**

Embargo ekonomi dapat didefinisikan sebagai perintah dari pihak pemerintah yang bertujuan untuk membatasi atau bahkan melarang segala bentuk perdagangan dan transaksi ekonomi dengan negara tertentu atau entitas yang telah ditentukan (Kierzkowski, 2000). Perintah ini tidak hanya mencakup satu aspek, tetapi dapat meluas ke berbagai bentuk pembatasan seperti pembatasan terhadap ekspor dan impor barang, investasi ke dalam atau dari negara yang ditargetkan, dan dalam beberapa kasus yang ekstrem, bahkan dapat berarti pemutusan total hubungan ekonomi dengan negara tersebut.

Tujuan utama dari embargo ekonomi adalah untuk mengisolasi negara yang menjadi target secara ekonomi, dengan harapan bahwa tekanan ekonomi yang dihasilkan akan memaksa pemerintah negara tersebut untuk mengubah kebijakan atau tindakannya. Tekanan ini biasanya dirancang agar negara yang dikenai embargo memenuhi keinginan atau tuntutan negara atau kelompok negara yang menerapkan embargo tersebut. Dengan demikian, embargo ekonomi bukan hanya sekadar instrumen kebijakan luar negeri, tetapi juga alat yang digunakan untuk mencapai tujuan politik tertentu (Hufbauer & Oegg, 2003).

Tujuan utama dari penerapan embargo ekonomi adalah untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku dan kebijakan negara sasaran melalui tekanan ekonomi. Secara lebih spesifik, tujuan embargo ekonomi dapat mencakup:

- a. Mendorong perubahan kebijakan atau tindakan negara sasaran yang dianggap tidak sesuai dengan norma atau kepentingan negara atau kelompok negara yang menerapkan embargo adalah salah satu tujuan utama dari penerapan embargo tersebut. Embargo ini seringkali diterapkan sebagai bentuk tekanan diplomatik untuk mengubah perilaku negara yang bersangkutan. Melalui embargo, negara atau kelompok negara yang menerapkannya berharap dapat mempengaruhi keputusan politik, ekonomi, atau sosial dari negara sasaran, sehingga negara tersebut akan lebih sesuai dengan norma-norma internasional yang berlaku atau kepentingan strategis dari negara atau kelompok negara yang melakukan embargo. Dengan cara ini, embargo berfungsi sebagai alat penting dalam diplomasi internasional untuk mencapai tujuan tertentu tanpa harus melibatkan tindakan militer atau intervensi langsung.
- b. Memberikan hukuman atau sanksi kepada negara sasaran atas tindakan atau kebijakan yang dinilai tidak dapat diterima oleh komunitas internasional, atau oleh negara-negara lain yang terlibat. Tindakan ini sering kali diambil sebagai respons terhadap pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh negara tersebut, seperti pelanggaran hak asasi manusia,

agresi militer yang tidak sah, atau kebijakan yang merugikan stabilitas regional atau global. Sanksi ini bisa berbentuk ekonomi, seperti embargo perdagangan atau pembekuan aset, diplomatik, seperti pengusiran duta besar atau penarikan perwakilan diplomatik, atau bahkan tindakan militer dalam kasus yang ekstrem. Tujuan utama dari sanksi ini adalah untuk mendorong perubahan perilaku negara sasaran, memperbaiki hubungan internasional, dan menjaga perdamaian serta keamanan global.

- c. Upaya untuk mencegah atau membatasi akses negara yang menjadi sasaran terhadap berbagai sumber daya, baik ekonomi maupun teknologi, merupakan langkah strategis yang sering diambil untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut tidak digunakan untuk tujuan yang tidak diinginkan. Dalam konteks ini, negara yang ditargetkan mungkin dihalangi atau dibatasi dalam mengakses teknologi canggih yang dapat digunakan dalam pengembangan senjata atau proyek yang berpotensi membahayakan. Selain itu, akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti bahan baku penting atau pendanaan internasional, juga dapat dikurangi atau bahkan dihentikan sama sekali untuk menghambat kemampuan negara tersebut dalam menjalankan kegiatan yang dianggap berisiko atau merugikan stabilitas global. Langkah-langkah ini biasanya diambil melalui kerjasama internasional dan kebijakan yang dirancang untuk mengurangi ancaman serta menjaga keamanan dan perdamaian dunia.

- d. Mengganggu stabilitas pemerintahan negara sasaran dengan cara menciptakan berbagai tekanan ekonomi yang signifikan serta menumbuhkan rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Langkah ini melibatkan strategi untuk melemahkan fondasi ekonomi negara tersebut, sehingga menyebabkan kesulitan ekonomi yang dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Ketidakstabilan ekonomi ini pada akhirnya akan memicu ketidakpuasan publik yang semakin meluas, yang dapat mengarah pada protes dan demonstrasi yang mengancam kekuatan pemerintah yang sedang berkuasa. Dengan demikian, tekanan ekonomi yang berkepanjangan menjadi alat efektif untuk mendestabilisasi pemerintah dan menciptakan kondisi yang tidak kondusif bagi keberlangsungan administrasi negara sasaran.
- e. Mencapai keuntungan politik atau diplomatik dalam konteks negosiasi dengan negara yang menjadi target. Dalam setiap bentuk negosiasi internasional, memperoleh keuntungan politik atau diplomatik adalah tujuan utama yang sering diupayakan oleh negara-negara yang terlibat. Hal ini melibatkan berbagai strategi dan taktik yang dirancang untuk meningkatkan posisi tawar serta mempengaruhi keputusan atau kebijakan negara lain. Misalnya, sebuah negara mungkin berusaha untuk mendapatkan dukungan dalam forum internasional, memperkuat aliansi strategis, atau mempengaruhi kebijakan luar negeri negara sasaran demi kepentingan nasionalnya sendiri. Keuntungan politik bisa berupa peningkatan pengaruh di kancah internasional, sementara

keuntungan diplomatik mungkin mencakup perjanjian yang menguntungkan atau pengakuan resmi atas klaim atau posisi tertentu. Semua ini memerlukan keterampilan diplomasi yang canggih, pemahaman yang mendalam tentang dinamika internasional, serta kemampuan untuk menavigasi kompleksitas hubungan antarnegara (Hufbauer & Oegg, 2003).

Embargo ekonomi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan cakupan dan tingkat kekerasan embargo tersebut (Kierzkowski, 2000): Embargo parsial: Pembatasan atau larangan terhadap perdagangan dan transaksi ekonomi tertentu dengan negara sasaran, seperti embargo ekspor senjata atau embargo impor minyak bumi.

- a. Embargo Total: Merupakan tindakan pemutusan atau pelarangan sepenuhnya terhadap segala bentuk interaksi ekonomi dan perdagangan dengan negara yang menjadi sasaran. Ini mencakup pelarangan semua kegiatan bisnis, transaksi keuangan, dan pertukaran barang serta jasa antara negara yang memberlakukan embargo dan negara yang dikenai embargo. Kebijakan ini biasanya diterapkan dengan tujuan untuk memberikan tekanan ekonomi yang signifikan kepada negara sasaran, dengan harapan bahwa langkah-langkah ini akan mendorong perubahan kebijakan atau perilaku tertentu dari pihak yang dikenai sanksi. Embargo total sering kali melibatkan kerjasama internasional, di mana beberapa negara atau organisasi internasional bersama-sama

memberlakukan larangan ini untuk meningkatkan efektivitasnya (Hanifah, 2017).

- b. Embargo multilateral adalah bentuk tindakan pembatasan perdagangan yang diterapkan oleh sejumlah negara atau organisasi internasional terhadap suatu negara tertentu. Tindakan ini bertujuan untuk membatasi atau menghentikan sepenuhnya hubungan komersial dengan negara sasaran, sebagai respons terhadap perilaku atau kebijakan yang dianggap melanggar norma-norma internasional atau sebagai upaya untuk mencapai tujuan politik tertentu melalui tekanan ekonomi. Dalam konteks ini, embargo multilateral menggambarkan kerja sama antarnegara atau organisasi internasional dalam menerapkan sanksi ekonomi, menunjukkan pentingnya kerjasama internasional dalam menanggapi tantangan global (Wardani, 2020).
- c. Embargo unilateral adalah tindakan penegakan kebijakan luar negeri di mana satu negara menerapkan pembatasan perdagangan atau ekonomi terhadap negara lain tanpa melibatkan konsensus internasional atau dukungan multilateral. Hal ini mencakup penangguhan atau larangan impor, ekspor, atau investasi dengan tujuan mempengaruhi kebijakan atau tindakan negara sasaran. Embargo semacam ini sering kali digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan ketidakpuasan atau protes terhadap kebijakan atau perilaku negara lain dalam konteks hubungan internasional (Hanifah, 2017).



- d. Embargo komprehensif merujuk pada jenis embargo yang melibatkan penghentian atau pembatasan yang luas terhadap beberapa sektor ekonomi. Jenis embargo ini tidak hanya mempengaruhi perdagangan barang-barang, tetapi juga mencakup investasi, bantuan ekonomi, dan bahkan pembatasan pergerakan individu. Embargo semacam ini seringkali digunakan sebagai alat politik untuk mempengaruhi kebijakan atau tindakan suatu negara atau pemerintah, dengan dampak yang meluas dan mencakup berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi (Wardani, 2020).

Pelaksanaan embargo ekonomi dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme (Rachamsintia, 2021), seperti:

- a. Peraturan atau undang-undang nasional yang secara tegas melarang perdagangan atau transaksi ekonomi dengan negara tertentu seringkali diimplementasikan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan luar negeri dan keamanan nasional. Larangan semacam itu bertujuan untuk mengatur hubungan ekonomi internasional negara tersebut dengan negara sasaran, dengan tujuan menghindari potensi konsekuensi politik, ekonomi, atau keamanan yang merugikan. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya mempengaruhi aktivitas perdagangan, tetapi juga mendorong untuk mempertimbangkan dampaknya secara lebih luas terhadap kepentingan nasional dan internasional negara yang bersangkutan.

- b. Pembekuan aset dan dana negara sasaran di negara atau negara-negara yang memberlakukan embargo merupakan tindakan yang dilakukan untuk menanggapi situasi diplomatik yang tegang. Langkah ini sering kali diambil sebagai respons terhadap kebijakan luar negeri yang kontroversial atau pelanggaran terhadap norma internasional. Dengan memblokir akses terhadap aset dan dana negara sasaran, tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah yang bersangkutan, serta untuk menekan atau membatasi sumber daya keuangan yang dapat digunakan untuk aktivitas yang dianggap merugikan kepentingan internasional atau regional.
- c. Pembatasan atau pencabutan akses suatu negara terhadap pasar global dan lembaga keuangan internasional dapat memiliki dampak yang signifikan. Tindakan ini bisa mempengaruhi tidak hanya stabilitas ekonomi domestik negara tersebut tetapi juga hubungan internasional secara luas. Pengaturan yang ketat atau bahkan pembatasan total terhadap akses pasar global dan lembaga keuangan internasional dapat menimbulkan tantangan besar dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan membangun kemitraan ekonomi yang sehat dengan komunitas global.
- d. penerapan sanksi sekunder terhadap negara atau entitas lain yang terlibat dalam transaksi ekonomi dengan negara yang menjadi sasaran sanksi, menunjukkan upaya untuk memperkuat efektivitas dan dampak dari langkah-langkah restriktif yang diberlakukan terhadap negara tersebut. Sanksi sekunder ini dimaksudkan untuk mengurangi atau menghentikan

kolaborasi ekonomi dengan negara sasaran, sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempengaruhi perilaku dan kebijakan internasional negara tersebut melalui tekanan ekonomi.

- e. Pemeriksaan dan penahanan kargo yang dicurigai melanggar embargo oleh pihak berwenang merupakan tindakan yang diambil untuk mengamankan kepatuhan terhadap kebijakan internasional yang telah ditetapkan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan embargo yang telah diberlakukan, sehingga menjaga integritas dan keamanan dalam pengelolaan perdagangan internasional (Hufbauer & Oegg, 2003).

Penerapan embargo ekonomi dapat memiliki dampak yang signifikan, baik bagi negara sasaran maupun negara atau negara-negara yang menerapkan embargo. Dampak potensial dari embargo ekonomi antara lain:

- a. Dampak ekonomi yang signifikan dari sanksi ini meliputi berbagai aspek. Terdapat penurunan yang mencolok dalam volume ekspor dan impor negara tersebut, mengakibatkan ketidakstabilan dalam suplai barang dan bahan mentah yang vital. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional tetapi juga menimbulkan penurunan yang tajam dalam tingkat investasi. Gangguan pada kegiatan produksi juga menjadi dampak serius, menghambat kemajuan sektor manufaktur dan layanan, sementara perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan nyata yang harus diatasi oleh pemerintah dan pelaku ekonomi di negara yang disasar.

- b. Dampak sosial dari fenomena ini sangat luas. Salah satunya adalah meningkatnya angka pengangguran akibat dari pengurangan lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini juga berdampak pada penurunan standar hidup masyarakat, karena mereka menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, ketidakstabilan pasokan barang kebutuhan pokok juga turut merasuki kehidupan sehari-hari masyarakat, yang menciptakan ketidakpastian dan kecemasan. Akibatnya, ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ini meningkat, menggerakkan mereka untuk mencari solusi yang lebih baik dan lebih berkelanjutan.
- c. Dampak politik dari situasi ini meliputi beberapa aspek yang signifikan. Pertama, meningkatnya ketegangan antara negara-negara yang terlibat dapat menyebabkan gangguan dalam hubungan internasional, memperumit diplomasi, dan meningkatkan risiko konflik bersenjata. Selain itu, destabilisasi pemerintahan di negara yang menjadi sasaran migrasi dapat mengancam stabilitas regional, menciptakan celah untuk campur tangan asing atau intervensi militer yang dapat memperburuk situasi keamanan secara keseluruhan.
- d. Dampak ekonomi bagi negara yang menerapkan embargo: Hilangnya pasar ekspor dan peluang investasi, peningkatan biaya perdagangan, dan potensi kehilangan mitra dagang.
- e. Dampak terhadap negara-negara lain: Gangguan pada rantai pasokan global, kenaikan harga komoditas, dan ketidakpastian ekonomi (Neuenkirch & Neumeier, 2014).

### C. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional (*National Interest*) merupakan konsep fundamental dalam studi hubungan internasional dan politik luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional dapat didefinisikan sebagai tujuan-tujuan fundamental yang ingin dicapai oleh suatu negara dalam hubungan internasionalnya, yang mencakup aspek-aspek seperti keamanan, kesejahteraan ekonomi, ideologi, dan status atau pengaruh di panggung internasional (Marleku, 2013). Konsep ini menjadi pedoman bagi pembuat kebijakan dalam menentukan prioritas dan arah kebijakan luar negeri suatu negara.

Dewi Fortuna Anwar membagi kepentingan nasional menjadi dua kategori: objektif dan subjektif. Kepentingan nasional objektif bersifat konstan dan tidak berubah dari waktu ke waktu, sedangkan kepentingan nasional subjektif ditentukan oleh para pemegang kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan nasional dapat berubah tergantung pada perspektif penguasa, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan negara (Wuryandi, 2008)

Hal ini menunjukkan bahwa upaya suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya tidak terbatas pada satu metode saja, melainkan dapat dicapai dengan berbagai instrumen, seperti ekonomi, politik, dan sebagainya. Seperti halnya Hans J. Morgenthau membagi kepentingan nasional menjadi dua tingkatan yaitu kepentingan nasional primer (*vital*) dan kepentingan nasional sekunder. Kepentingan nasional primer berkaitan

dengan perlindungan identitas fisik, politik, dan budaya, serta keamanan dan kelangsungan hidup bangsa. Sedangkan, kepentingan nasional sekunder mencakup kepentingan lain yang masih dapat dikompromikan atau diupayakan melalui negosiasi dengan negara lain. (Markelu, 2013)

Menurut Hans J. Morgenthau, salah satu tokoh utama dalam pemikiran realis, kepentingan nasional merupakan konsep kunci dalam politik luar negeri, yang merefleksikan kebutuhan negara untuk melindungi integritas fisik, politik, dan budaya dari gangguan eksternal (Morgenthau, 1982). Kepentingan nasional tidak hanya mencakup aspek keamanan semata, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Hans J. Morgenthau, seorang tokoh utama dalam pemikiran realis klasik dalam hubungan internasional, mengembangkan teori kepentingan nasional yang menjadi salah satu landasan penting dalam analisis politik luar negeri. Morgenthau berpendapat bahwa kepentingan nasional adalah konsep kunci dalam memahami perilaku negara di arena internasional.

Hans J. Morgenthau, salah satu tokoh terkemuka dalam aliran pemikiran realis klasik, memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang kepentingan nasional dalam hubungan internasional. Morgenthau mendefinisikan kepentingan nasional sebagai "kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan budaya dari gangguan negara-negara lain". Ia menekankan bahwa kepentingan nasional harus didefinisikan dalam istilah kekuasaan (power), yang menurutnya merupakan esensi dari politik internasional. Menurut

Morgenthau, kepentingan nasional terdiri dari dua elemen: elemen yang secara logis diperlukan dan merupakan inti dari kepentingan nasional, serta elemen yang ditentukan oleh keadaan dan dapat berubah sesuai dengan waktu dan konteks (Moejito, 2018).

Teori kepentingan nasional Morgenthau didasarkan pada beberapa prinsip dasar. Pertama, ia menekankan rasionalitas, berpendapat bahwa negara bertindak secara rasional dalam mengejar kepentingan nasionalnya. Kedua, ia melihat kelangsungan hidup negara sebagai kepentingan nasional yang paling mendasar. Ketiga, Morgenthau memandang kekuasaan sebagai tujuan utama negara dalam arena internasional. Keempat, ia menekankan universalitas kepentingan nasional, yang berarti semua negara mengejar kepentingan nasional mereka terlepas dari ukuran atau ideologi. Terakhir, Morgenthau berpendapat tentang relativitas moral dalam tindakan negara, menyatakan bahwa negara harus bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya, yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip moral universal.

Morgenthau mengidentifikasi beberapa komponen utama kepentingan nasional, termasuk integritas teritorial, kedaulatan politik, keamanan militer, kesejahteraan ekonomi, dan prestise internasional. Ia juga mengusulkan hierarki kepentingan nasional, yang terdiri dari kepentingan vital (berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup negara), kepentingan utama (penting tetapi tidak mengancam kelangsungan hidup negara secara langsung), dan kepentingan sekunder (dapat dinegosiasikan atau dikompromikan).

Dalam teorinya, Morgenthau menekankan pentingnya diplomasi dalam mengejar kepentingan nasional. Ia berpendapat bahwa diplomasi yang efektif harus mampu mendefinisikan tujuan-tujuan politik luar negeri dalam konteks kekuatan yang tersedia, menilai tujuan-tujuan negara lain, menentukan kompatibilitas tujuan-tujuan tersebut, dan menggunakan sarana yang tepat untuk mencapainya. Meskipun teori Morgenthau telah menerima kritik karena terlalu menekankan pada kekuasaan dan mengabaikan faktor-faktor lain seperti kerja sama internasional, kontribusinya tetap signifikan. Teorinya memberikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami perilaku negara dalam politik internasional, menekankan pentingnya analisis rasional dalam pembuatan kebijakan luar negeri, dan membantu menjelaskan persistensi konflik dan kompetisi dalam hubungan internasional (Moejito, 2018).

Kepentingan nasional suatu negara dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan tingkat kepentingan dan prioritasnya. Klasifikasi umum yang sering digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Kepentingan Nasional Vital (Vital National Interests) Kepentingan nasional vital merupakan kepentingan yang paling mendasar dan penting bagi keberadaan dan kelangsungan hidup suatu negara. Kategori ini mencakup aspek-aspek seperti pertahanan dan keamanan teritorial, kedaulatan politik, dan kelangsungan ideologi atau sistem pemerintahan suatu negara. Negara akan menggunakan segala cara, termasuk penggunaan kekuatan militer, untuk melindungi kepentingan nasional vitalnya (Marleku, 2013).



- b. **Kepentingan Nasional Utama (Major National Interests)** Kepentingan nasional utama mencakup aspek-aspek penting yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara, meskipun tidak sampai pada tingkat vital. Kategori ini dapat mencakup aspek-aspek seperti akses pada sumber daya alam, stabilitas ekonomi, keamanan energi, dan keamanan maritim atau jalur perdagangan (Marleku, 2013). Negara akan berupaya keras untuk melindungi kepentingan nasional utamanya, tetapi tidak selalu menggunakan kekuatan militer.
- c. **Kepentingan Nasional Sekunder (Peripheral National Interests)** Kepentingan nasional sekunder merupakan kepentingan yang lebih rendah prioritasnya dibandingkan dengan dua kategori sebelumnya. Kategori ini mencakup aspek-aspek seperti promosi nilai-nilai atau ideologi tertentu, pengaruh dalam organisasi internasional, atau dukungan bagi kelompok-kelompok tertentu di luar negeri (Marleku, 2013). Negara akan berupaya untuk memajukan kepentingan nasional sekundernya, tetapi tidak akan menggunakan kekuatan militer atau mengambil risiko yang signifikan.

Kepentingan nasional suatu negara tidak bersifat statis, melainkan dapat berubah dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Robert Keohane dan Joseph Nye dalam konsep *Complex Interdependence* menyatakan bahwa Kepentingan Nasional juga dipengaruhi oleh pentingnya hubungan ekonomi dan sosial dalam hubungan bilateral sebuah negara.

Konsep "Interdependensi Kompleks" mengacu pada hubungan saling ketergantungan yang rumit dan berlapis-lapis antara berbagai aktor atau entitas dalam suatu sistem (Robert O. Keohane, 2012). Istilah ini sering digunakan dalam studi hubungan internasional untuk menggambarkan hubungan antara negara-negara, tetapi juga dapat diterapkan pada berbagai konteks lain, seperti organisasi, komunitas, atau bahkan individu.

Interdependensi kompleks menekankan bahwa hubungan antarnegara tidak hanya didasarkan pada kekuatan militer atau ekonomi saja, tetapi juga pada berbagai isu lain seperti lingkungan, sosial, budaya, dan teknologi. Negara-negara saling bergantung satu sama lain untuk mengatasi masalah-masalah global yang kompleks. Negara dengan ekonomi yang kuat cenderung memiliki kepentingan nasional yang lebih luas, sedangkan negara dengan ekonomi yang lemah cenderung lebih fokus pada kepentingan domestik.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian Zikri Akbar Haruny dan Asep Setiawan (2023) yang berjudul "Kebijakan Arab Saudi Memulihkan Hubungan Diplomatik Dengan Qatar Tahun 2021" menganalisis faktor-faktor pendorong normalisasi hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Qatar setelah Krisis Diplomasi pada tahun 2017. Faktor – faktornya yaitu Arab Saudi tampaknya tidak lagi menganggap Qatar sebagai ancaman terkait dukungan terhadap kelompok-kelompok seperti ISIS dan Ikhwanul Muslimin. Hal ini mungkin disebabkan oleh perubahan kebijakan Qatar atau penilaian ulang dari pihak Arab Saudi.

Kemudian Arab Saudi menilai bahwa ancaman dari kedekatan Qatar dengan Iran telah berkurang. Perubahan ini mungkin dipengaruhi oleh dinamika regional yang lebih luas atau pergeseran prioritas kebijakan luar negeri Arab Saudi. Secara khusus, penelitian ini mengeksplorasi peran Amerika Serikat (AS) dalam mendorong normalisasi hubungan kedua negara tersebut, terutama dalam konteks hubungan Qatar dengan Iran. Penelitian ini memberikan wawasan tentang kepentingan AS dalam menengahi konflik di kawasan Teluk dan mencegah semakin kuatnya pengaruh Iran di Qatar.

Pada Penelitian Sukma Bintang Cahyani (2019), yang berjudul “Faktor-Faktor Manuver Politik Qatar dalam Penguatan Aliansi dengan Iran Pasca Kasus Krisis Diplomatik Qatar tahun 2017” berfokus pada faktor-faktor yang mendorong penguatan aliansi antara Iran - Qatar pasca Krisis Diplomasi tahun 2017. Dapat disimpulkan bahwa strategi "bandwagoning" dengan Iran merupakan langkah strategis yang efektif bagi Qatar. Strategi ini memungkinkan Qatar untuk memutarbalikkan keadaan dan bertahan (*survive*) dalam menghadapi tekanan dan isolasi dari negara-negara tetangganya. Penelitian ini secara deskriptif menganalisis manuver politik Qatar dalam meningkatkan kerjasama dengan Iran, baik dalam bidang ekonomi maupun politik, sebagai respon atas embargo yang dijatuhkan oleh negara-negara Teluk lainnya. Penelitian ini relevan dengan judul skripsi yang diteliti, karena mengeksplorasi dinamika hubungan Iran - Qatar dalam konteks Krisis Diplomasi.

Penelitian Meri Ermawati (2022) yang berjudul “Kerja Sama Perdagangan Qatar Dan Iran Di Bidang Energi Dan Pangan Selama Qatar Menghadapi Tekanan Internasional (Blokade Dan Dugaan Terorisme) Tahun 2017-2019” disimpulkan bahwa Iran menjadi yang terdepan dalam memanfaatkan Krisis Diplomasi Qatar dengan memperluas kerja sama bilateral. Iran memasok kebutuhan pokok seperti makanan dan obat-obatan ke Qatar, membantu negara tersebut menjaga stabilitas domestik. Kerja sama ini, terutama dalam pembangunan ekonomi, memfasilitasi distribusi barang dagangan dan memperkuat hubungan kedua negara. Dukungan Iran terbukti krusial bagi Qatar dalam mengatasi blokade, menormalkan situasi domestik, mengatasi kelangkaan pangan, dan mengurangi tekanan internal. Secara khusus menganalisis kerjasama perdagangan antara Iran - Qatar selama periode 2017-2019, yang merupakan masa Krisis Diplomasi antara Qatar dengan negara-negara Teluk lainnya. Penelitian ini relevan dalam memahami dimensi ekonomi dari penguatan aliansi Iran - Qatar saat itu.

Pada Penelitian Afif Notodewo, Yon Machmudi (2022) yang berjudul “Analisis Normalisasi Hubungan Arab Saudi dengan Qatar Tahun 2021” menggunakan perspektif neorealisme untuk menganalisis alasan normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Qatar pada tahun 2021. Penelitian ini menyimpulkan bahwa normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Qatar didorong oleh pertimbangan strategis dalam konteks perebutan hegemoni regional. Arab Saudi mungkin telah memperhitungkan keuntungan relatif yang dapat diperoleh dari normalisasi hubungan, serta menghindari kerugian

yang lebih besar jika terus melanjutkan blokade. Penelitian ini memberikan konteks dinamika hubungan antara negara-negara Teluk dan peran Iran dalam konflik tersebut. Keputusan Arab Saudi untuk menormalisasi hubungan dengan Qatar didorong oleh beberapa pertimbangan strategis. Krisis Qatar memperburuk persaingan regional dengan meningkatkan pengaruh Iran dan Turki di Teluk, yang mengancam posisi dominan Arab Saudi. Normalisasi hubungan menjadi respons terhadap strategi Qatar yang memanfaatkan dukungan Iran dan Turki untuk melawan tekanan Arab Saudi. Blokade terhadap Qatar juga dapat dilihat sebagai contoh dilema tahanan (prisoner's dilemma), di mana keputusan awal Arab Saudi untuk memblokir Qatar ternyata merugikan kepentingan mereka dalam jangka panjang. Faktor-faktor seperti terpilihnya Joe Biden, pandemi Covid-19, dan penurunan harga minyak semakin memperburuk posisi Arab Saudi, sehingga mendorong mereka untuk memilih normalisasi hubungan sebagai jalan keluar yang paling rasional.

Pada Penelitian Ahmed Anwer Mohammed, Ravichandran Moorthy (2020), yang berjudul "Saudi-Iran Rivalry In The Middle East: Implication To National Security" Disimpulkan bahwa Persaingan antara Arab Saudi dan Iran telah mempengaruhi keamanan regional Timur Tengah. Sejak tahun 1979, hubungan Saudi-Iran telah tegang karena persaingan untuk mendapatkan kekuasaan relatif di Timur Tengah. Ketegangan Saudi-Iran berada pada tingkat terburuk dalam beberapa dekade terakhir; tidak hanya terjadi penghentian hubungan diplomatik, kedua negara juga terlibat dalam

beberapa perang proksi di Yaman, Suriah, dan Irak, di samping keterikatan dalam konflik sektarian Sunni-Syiah. Dengan adanya dinamika tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana persaingan Saudi-Iran dalam memperebutkan kekuasaan berdampak pada keamanan regional Timur Tengah.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu ini memberikan perspektif yang komprehensif tentang dinamika hubungan Qatar dengan Iran, konteks Krisis Diplomasi di kawasan Teluk, serta keterlibatan aktor-aktor lain seperti Arab Saudi dan AS. Penelitian-penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memperdalam pemahaman Anda tentang topik yang Anda angkat dalam skripsi.